

PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DI ERA DIGITALISASI: STUDI LITERATUR DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF DESKRIPTIF

Rabiatul Adawiyah¹⁾, Dita Lestari²⁾, Wardah Syafirah³⁾, Riska Ayu Purnama Dewi⁴⁾, Jihan Hafidzah⁵⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa
awi23252005@gmail.com, ditaalstri@gmail.com, wardasyafira1@gmail.com,
riskapurnama737@gmail.com, Jihanhafidzah3@gmail.com

ABSTRACT

The digitalization era has opened new opportunities to enhance public participation in government budget management processes. Active public participation through digital platforms such as e-budgeting, e-musrenbang, and public expenditure reporting applications is believed to promote transparency and strengthen budget accountability. This study aims to analyze the impact of public participation on the level of accountability in government budget management, particularly in the context of the ongoing digital transformation. The method used is a descriptive qualitative approach with a literature review of policies, regulations, and the digital budgeting practices in various regions. The findings indicate that increased access to information, ease of reporting, and public involvement in budgeting and oversight contribute positively to public accountability. However, effective participation is still hindered by the digital divide, low financial literacy among the public, and the limited capacity of government institutions to systematically follow up on public aspirations. Therefore, synergy between technology, regulations, and community empowerment is key to promoting more transparent and accountable budget governance in the digital era.

Keywords: *public participation, accountability, government budget, digitalization, transparency*

ABSTRAK

Era digitalisasi telah membuka peluang baru dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengelolaan anggaran pemerintah. Partisipasi masyarakat yang aktif melalui platform digital seperti e-budgeting, e-musrenbang, dan aplikasi pelaporan pengeluaran publik diyakini dapat mendorong transparansi dan memperkuat akuntabilitas anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi publik terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya dalam konteks transformasi digital yang tengah berlangsung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap kebijakan, regulasi, dan praktik digitalisasi anggaran di berbagai daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan akses informasi, kemudahan

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pelaporan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas publik. Namun, partisipasi yang efektif masih terkendala oleh kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas institusi pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi publik secara sistematis. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di era digital.

Kata kunci: *partisipasi publik, akuntabilitas, anggaran pemerintah, digitalisasi, transparansi*

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik tidak hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan bahwa pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya publik dilakukan secara adil, efisien, dan bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, era digitalisasi telah menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran pemerintah.

Transformasi digital yang diterapkan melalui berbagai inisiatif seperti e-budgeting, e-musrenbang, dan platform pelaporan publik telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan cepat. Masyarakat kini dapat mengakses informasi anggaran secara real-time, memberikan masukan terhadap rencana program pemerintah, serta melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal digital. Partisipasi publik berbasis digital ini berpotensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas, karena mampu menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, efektivitas partisipasi publik dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan. Kesenjangan digital, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas institusi pemerintah dalam mengelola dan merespons aspirasi publik menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana partisipasi publik di era digital dapat benar-benar mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta strategi apa yang dapat memperkuat sinergi antara masyarakat, teknologi, dan birokrasi dalam membangun tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

METODE

Dalam kerangka penelitian ini, studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga sebagai landasan konseptual untuk membangun pemahaman teoritis yang kokoh dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri akar permasalahan secara historis dan normatif, mengevaluasi kerangka teoritis yang telah dikembangkan oleh para ahli, serta mengidentifikasi celah penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut (Bungin, 2008; Creswell, 2014). Literatur yang dikaji mencakup teori-teori utama mengenai partisipasi publik, termasuk model tangga partisipasi warga yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein (Ladder of Citizen Participation), teori deliberatif dalam demokrasi partisipatoris, serta prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan inklusivitas.

Selain itu, studi literatur juga menelusuri perkembangan konseptual dan praktik mengenai digitalisasi dalam sektor publik, khususnya dalam konteks e-governance, e-budgeting, open government, serta e-participation. Konsep-konsep ini menjadi sangat penting untuk memahami dinamika dan mekanisme yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mentransformasi hubungan antara pemerintah dan warga negara, dari yang semula bersifat top-down menjadi lebih interaktif, transparan, dan responsif (Denzin & Lincoln, 2011). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai cara kerja platform digital, bagaimana akses publik difasilitasi, serta bagaimana data digunakan dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam analisis ini.

Penelaahan terhadap praktik-praktik digitalisasi anggaran di Indonesia dilakukan secara kontekstual dan komparatif. Ini mencakup implementasi sistem seperti e-budgeting yang telah diterapkan di berbagai daerah, penggunaan SP4N-LAPOR! sebagai instrumen pelaporan keluhan publik, serta keterbukaan data anggaran melalui situs resmi pemerintah pusat dan daerah. Studi kasus dari daerah seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi yang dikenal memiliki inisiatif transparansi fiskal berbasis teknologi digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang keberhasilan dan tantangan di lapangan (Yin, 2011). Studi-studi tersebut membantu mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat terciptanya partisipasi publik yang bermakna dan berdampak.

Pendekatan analisis dilakukan secara tematik melalui teknik content analysis, yaitu menganalisis isi teks dan dokumen dengan cara mengidentifikasi kata kunci, frasa penting, serta pola narasi yang muncul dari sumber-sumber yang dikaji. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkategorisasi informasi ke dalam tema-tema besar seperti transparansi fiskal, pengawasan publik, efisiensi birokrasi, dan inovasi teknologi dalam tata kelola keuangan (Miles & Huberman, 1994). Peneliti juga mengaitkan tema-tema tersebut dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga menghasilkan interpretasi yang bersifat sintesis antara teori dan fakta empirik.

Dalam proses interpretasi data, penelitian ini secara kritis mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk lanskap kebijakan digitalisasi anggaran di Indonesia. Faktor-faktor seperti kesenjangan digital antarwilayah, ketimpangan literasi digital, resistensi dari kalangan birokrasi terhadap keterbukaan data, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah menjadi variabel penting dalam menganalisis efektivitas partisipasi publik. Penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika desentralisasi fiskal dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana teknologi diterapkan dan dimanfaatkan.

Metodologi yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menyusun simpulan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang partisipasi digital dan akuntabilitas fiskal dalam kerangka negara berkembang, dengan mengambil studi kasus Indonesia sebagai representasi. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam pengembangan teori partisipasi di era digital serta menjadi bahan diskusi dalam pengembangan model-model akuntabilitas yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kemajuan teknologi (Denzin & Lincoln, 2011; Creswell, 2014).

Sementara itu, secara praktis, temuan dari studi ini dapat dijadikan masukan bagi perancang kebijakan, lembaga pemerintah, serta aktor non-pemerintah dalam menyusun strategi penguatan partisipasi publik berbasis digital. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur digital, pelatihan dan pendidikan literasi digital bagi masyarakat, perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), dan pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan yang partisipatif dan transparan. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini diharapkan

tidak hanya berhenti pada tataran wacana ilmiah, tetapi juga berdampak langsung pada praktik tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Kehadiran teknologi informasi memungkinkan terbentuknya saluran komunikasi yang lebih cepat, transparan, dan inklusif antara pemerintah dan warga negara. Salah satu dampak positif dari perubahan ini adalah meningkatnya potensi partisipasi publik dalam siklus anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Partisipasi publik dalam konteks digital dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti e-budgeting, e-planning, forum konsultasi daring, serta aplikasi pelaporan masyarakat seperti LAPOR! dan SP4N. Melalui platform-platform ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui perencanaan dan penggunaan anggaran secara real-time, mengajukan aspirasi, serta melaporkan dugaan penyimpangan. Keterbukaan informasi ini mendorong terjadinya kontrol sosial yang lebih aktif dan menciptakan tekanan publik yang konstruktif agar pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, kehadiran teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan anggaran lebih mudah dipantau oleh masyarakat umum. Masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek kebijakan, melainkan menjadi subjek yang aktif memberikan masukan terhadap program dan prioritas anggaran. Proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), misalnya, kini telah banyak dilakukan secara daring, sehingga memperluas akses partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit terlibat karena keterbatasan waktu, jarak, atau prosedur birokratis yang rumit.

Namun, partisipasi publik yang terjadi di era digital tidak selalu menjamin terwujudnya akuntabilitas yang optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah tantangan yang masih harus diatasi, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah. Dari sisi masyarakat, tantangan utama terletak pada kesenjangan digital dan rendahnya literasi keuangan. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, dan tidak semua memahami proses anggaran secara memadai untuk dapat memberikan masukan yang relevan atau melakukan pengawasan yang efektif.

Sementara itu, dari sisi pemerintah, kurangnya kesiapan dalam menanggapi aspirasi masyarakat secara terbuka dan sistematis menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang partisipatif dan akuntabel. Banyak laporan publik atau masukan dari masyarakat yang tidak mendapat tanggapan serius, atau tidak ditindaklanjuti dalam proses kebijakan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjadikan partisipasi digital hanya bersifat simbolik atau formalitas belaka.

Selain itu, masih terdapat tantangan internal dalam birokrasi seperti rendahnya transparansi internal, resistensi terhadap keterbukaan data, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas di tingkat pelaksana. Teknologi digital memang membuka peluang partisipasi, tetapi apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang responsif dan budaya birokrasi yang akuntabel, maka dampaknya akan terbatas. Dalam hal ini, peran regulasi dan komitmen politik sangat menentukan arah keberhasilan partisipasi digital dalam meningkatkan akuntabilitas.

Partisipasi publik yang efektif menuntut adanya sinergi antara teknologi, kapasitas masyarakat, dan respons pemerintah. Teknologi hanya menjadi alat bantu. Nilai partisipasi justru terletak pada proses dialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat. Ketika masukan masyarakat ditanggapi dengan serius dan dimasukkan ke dalam proses perencanaan dan

evaluasi anggaran, maka akan tercipta bentuk akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial.

Dengan demikian, digitalisasi anggaran bukan sekadar proses teknis, tetapi harus dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan sumber daya negara. Pemerintah perlu mengembangkan sistem yang tidak hanya transparan secara data, tetapi juga akuntabel secara tindakan. Di sisi lain, masyarakat perlu terus diberdayakan agar partisipasi yang diberikan tidak berhenti pada pengaduan semata, tetapi berkembang menjadi kontrol sosial yang konstruktif dan solutif.

KESIMPULAN

Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran publik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi publik kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, luas, dan efisien. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran negara. Inovasi digital seperti e-budgeting, e-musrenbang, dan sistem pelaporan seperti SP4N-LAPOR! menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi publik yang aktif dan berkualitas merupakan pilar utama dalam praktik good governance, karena mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap kontrol sosial dan akuntabilitas publik. Ketika masyarakat diberi akses terhadap informasi yang memadai dan ruang untuk menyampaikan aspirasi, maka akan tercipta ekosistem pemerintahan yang lebih demokratis dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, keberadaan saluran digital juga memungkinkan pengawasan berbasis data yang dapat mencegah penyimpangan anggaran, serta mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat tantangan struktural yang menghambat efektivitas partisipasi digital, antara lain kesenjangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas birokrasi dalam mengelola interaksi digital secara responsif dan profesional. Tanpa penanganan serius terhadap hambatan-hambatan ini, partisipasi publik melalui platform digital dikhawatirkan hanya menjadi formalitas belaka, yang tidak mampu memberikan dampak substantif terhadap kualitas pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat integrasi antara teknologi, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke pelosok negeri, menyelenggarakan program peningkatan literasi digital dan anggaran, serta membangun sistem birokrasi yang adaptif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus diberdayakan agar mampu memanfaatkan kanal digital secara kritis, konstruktif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, partisipasi publik di era digital bukan hanya menjadi simbol keterbukaan pemerintah, tetapi juga menjadi kekuatan kolektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, jujur, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kesuksesan digitalisasi anggaran tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh sejauh mana teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat demokrasi fiskal dan membangun kepercayaan antara negara dan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.

- Bungin, B. (2008). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good public governance: Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Mahsun, M. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2018). *Peran teknologi informasi dalam transparansi anggaran daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 45-58.
- Susanto, A., & Meiryani. (2020). *E-government dan akuntabilitas publik: Pendekatan good governance*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(2), 123-135.
- World Bank. (2003). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press.